

## SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN

Sutri Handayani<sup>1</sup>, Rizky Nadian Syach<sup>2</sup>, Muhammad Farid Aldiansyah<sup>3</sup>, Eli Luthfianah<sup>4</sup>, Ainur Rohmah<sup>5</sup>, Sri Wahyuni<sup>6</sup>, Setiowati Ningsih<sup>7</sup>, Abid Muhtarom<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email: sutrihandayani99@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : rizkynadiansyach@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : faridaldiansyah9090@gmail.com

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : Eli12@gmail.com

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : ainurr@gmail.com

<sup>6</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : Sriwahyuni@gmail.com

<sup>7</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : fNingsih@gmail.com

<sup>8</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan, Jl. Veteran No.53 A Lamongan  
Email : abidmuhtarom@unisla.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perangkat desa Pataan memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi dan untuk mengetahui seberapa efektifkah sistem keuangan akuntansi alokasi dana desa pada Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Penelitian berbasis deskriptif ini mencoba mendeskripsikan gambaran nyata dari fenomena yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Sedangkan teknik yang digunakan berupa observasi langsung ke desa Pataan, Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, yang kemudian dilakukan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dan analisis data dapat ditarik kesimpulan yaitu : Dalam pengelolaan dana desa di desa Pataan sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sedangkan pelaksana Sistem Informasi Akuntansi adalah sekretaris desa itu sendiri yang telah mampu mengatur keuangan desa dengan baik sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi. Setiap penerimaan atau pengeluaran dana desa dicatat dalam kas umum desa. Hanya saja masih kurangnya fasilitas penunjang bagi petugas pengelola laporan keuangan dana desa.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, ADD

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine whether Pataan village officials have the ability to make Village Fund Allocation financial reports in accordance with the Accounting Information System and to find out how effective the village fund allocation accounting financial system is in Pataan Village, Sambeng District, Lamongan Regency. This descriptive-based research tries to describe the real picture of the phenomena that occur in the application of the Village Fund Allocation Accounting Information System in Pataan Village, Sambeng District, Lamongan Regency. While the technique used is direct observation to the village of Pataan, Sambeng District, Lamongan Regency, which is then carried out interviews and documentation studies. After the data is collected and data analysis, conclusions can be drawn, namely: In the management of village funds in Pataan village, it is in accordance with the accounting information system and has used a computerized system. While the implementer of the Accounting Information System is the village secretary himself who has been able to properly manage village finances in accordance with the Accounting Information System. Every receipt or expenditure of village funds is recorded in the village general treasury. It's just that there is still a lack of supporting facilities for officers managing village fund financial reports.*

**Keywords:** Accounting information system, ADD.

## PENDAHULUAN

Informasi tentang inovasi data sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bekerja di pemerintahan. Selain itu, informasi tentang inovasi data merupakan modal utama untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang. Untuk mengakui pemerintahan yang hebat, cenderung dimulai dengan melaksanakan langkah-langkah penataan, perencanaan dan pengakuan yang mencakup pekerjaan dinamis warga. Jadi penting untuk membangun kemampuan untuk memiliki pilihan untuk berkoordinasi dengan pilihan berbasis informasi yang mendukung, mengawasi media ke dalam distribusi data dan selanjutnya meningkatkan kemampuan pembukuan. Pemanfaatan dan pembentukan kerangka tersebut diharapkan dapat mempermudah pemerintah desa untuk menyusun, mengontrol banyak informasi, membatasi kesalahan dan menjaga konsistensi antar langkah.

Desa akan memiliki jenis-jenis penerimaan seperti Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Desa, mengingat Dana Keuangan Pusat dan Daerah yang diperoleh Kabupaten/Desa, penyaluran belanja bergantung pada APBN, pemberian berupa uang bergantung pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Desa, serta berkah dan karunia yang tidak terbatas pada pihak luar. Aset tambahan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dapat secara progresif membentuk dan melibatkan penduduk desa (Faozi 2015). Namun, banyak kalangan berspekulasi bahwa kapasitas pemerintah desa di daerah itu masih rendah dan tidak siap dalam

mengawasi aset desa, akan ada risiko kesalahan baik otoritas maupun besar yang dapat memicu pertengkaran administrasi mengingat kurangnya kemampuan pelopor desa. dan pemerintah desa dalam masalah organisasi keuangan desa, mengumumkan, dan tanggung jawab. Hal ini terjadi karena pemerintah desa yang akan mendapatkan pembiayaan untuk kegiatan dan kegiatan yang bergantung pada sumber yang berbeda (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengakibatkan harus memiliki pilihan untuk mengawasi secara langsung, akuntabel, dan tanpa pamrih bergantung pada penyalahgunaan. Sama halnya dengan memanfaatkan kerangka data pembukuan, masih banyak yang berspekulasi lemah dan tidak tepat menggunakan Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri.

Maka berdasarkan itu Sistem informasi akuntansi sangatlah diharapkan pada menunjang pemerintah Desa Pataan terutama pada menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai menggunakan mekanisme yang semestinya supaya nantinya bisa mempermudah pada hal pelaporan dan pertanggungjawaban pada pemerintah kabupaten yang berkaitan menggunakan dana desa. Berdasarkan latar belakang kasus yg sudah diuraikan, maka penulis merumuskan kasus yg akan pada bahas yaitu, Bagaimana sistem informasi akuntansi alokasi dana desa yang ditetapkan pada Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ? Dan seberapa efektifkah sistem informasi akuntansi alokasi dana desa pada Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ? Tujuan yang ingin pada capai pada penelitian ini merupakan

buat mengetahui bagaimana sistem keterangan akuntansi alokasi dana desa yang ditetapkan pada Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dan buat mengetahui seberapa efektifkah sistem informasi akuntansi alokasi dana desa pada Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berbasis deskriptif. Menurut Hidayat Syah (2010:5) penelitian deskriptif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian suatu masa tertentu”. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Moleong (2005:5) “Data kualitatif adalah data yang dihasilkan dari pendekatan naturalistik untuk mencari dan menentukan pengertian dan pemahanan tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus”. Dalam penelitian, data kualitatif yang digunakan adalah data Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah “data yang tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti”. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu dari data keuangan dalam hal ini terfokus dalam

Alokasi Dana Desa di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem informasi akuntansi di desa Pataan telah berjalan dengan baik, pihak di SIA telah memenuhi prasyarat dan telah melihat bagaimana SIA dilakukan. Sedangkan yang berhubungan dengan SIA sebenarnya adalah kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa. Sekretariat tidak berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala desa, sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang pelatihan dan administrasi, khususnya:

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Mengumpulkan, memperbaiki dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- e. Membuat laporan pemerintah desa.
- f. Melakukan tugas yang diberikan kepala desa.

Sekretaris desa dibantu oleh staf keuangan atau bendahara desa yang memiliki kewajiban membantu sekretaris desa dalam masalah keuangan, mendapatkan dan memberikan uang dengan bukti yang disahkan oleh kepala desa, mengungkapkan kondisi tempat penyimpanan desa kepada sekretaris desa, menyelesaikan tugas yang berbeda diberikan oleh kepala desa.

Dalam pengerjaan SIA di desa pataan yang sebelumnya menggunakan system komputerisasi, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pertemuan dengan Ibu Zahrotul Mujahidah yang merupakan sekretaris desa, khususnya: “sistem informasi akuntansi alokasi

dana desa ini menggunakan komputerisasi" Namun untuk situasi ini masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya fasilitas dan dalam pengangkutan masih banyak orang yang gagal melihat bagaimana SIA itu sendiri.

Tabel 4.1  
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun 2020

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA PATAAN TAHUN ANGGARAN 2020			
URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	73.671.010	73.671.010	
Hasil Usaha Desa	42.030.000	42.030.000	
Swadaya Partisipasi Dan Gotong Royong	31.641.010,00	31.641.010,00	
Pendapatan Transfer	1.730.071.700,00	1.730.071.700,00	
Dana Desa	841.684.000,00	1.730.071.701,00	
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	30.348.700,00	1.730.071.702	
Alokasi Dana Desa	408.039.00,00	1.730.071.703	
Bantuan Keuangan Kabupate/Kota	450.000.000,00	1.730.071.704	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.803.742.710,00</b>	<b>1.730.071.705</b>	
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>521.058.710,00</b>	<b>521.058.710,00</b>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap. Tunjangan Dan Operasio	521.058.710,00	512058710,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala 1	37.488.000,00	37.488.000,00	ADD. PBH
Belanja Pegawai	37.488.000,00	37.488.000,00	
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	37.488.000,00	37.488.000,00	
Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	
Tunjangan Kepala Desa	1.488.000,00	1.488.000,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangk	331.577.150,00	331.577.150,00	ADD. PBH
Belanja Pegawai	331.577.150,00	331.577.150,00	
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	331.577.150,00	331.577.150,00	
Penghasilan Tetap Perangkat Desa	317.890.800,00	331.577.150,00	
Tunjangan Perangkat Desa	13.686.350,00	13.686.350,00	
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa	22.903.856,00	22.903.856,00	
Belanja Pegawai	22.903.856,00	22.903.856,00	
Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	22.903.856,00	22.903.856,00	
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	18.905.053,00	18.905.053,00	
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	157.057,00	157.057,00	
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.041.746,00	2.041.746,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk.Honor)	22.390.704,00	22.390.704,00	ADD. PBH
Belanja Barang Dan Jasa	22.390.704	22.390.704	

URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Barang Perlengkapan	17.590.704,00	17.590.704,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	3.774.350,00	3.774.350,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Dan Bahan	11.000.000,00	11.000.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Peggandaan	400.000,00	400.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.416.354,00	2.416.354,00	
Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	4.800.000,00	
Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.800.000,00	
Penyediaan Tunjangan Bpd	5.900.000,00	5.900.000,00	ADD
Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	
Tunjangan Bpd	5.900.000,00	5.900.000,00	
Tunjangan Kinerja Bpd	5.900.000,00	5.900.000,00	
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Peggandaan	150.000,00	150.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	2.750.000,00	
Penyediaan Insentif/Operasionai RT/RW	11.250.000,00	11.250.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	
Belanja Operasional Perkantoran	11.250.000,00	11.250.000,00	
Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	11.250.000,00	11.250.000,00	
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Deşa Dan Pe	42.030.000,00	42.030.000,00	PAD
Belanja Pegawai	42.030.000,00	42.030.000,00	
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Deşa	10.350.000,00	10.350.000,00	
Tambahan Tunjangan Kepala Deşa	10.350.000,00	10.350.000,00	
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Deşa	31.680.000,00	31.680.000,00	
Tambahan Tunjangan Perangkat Deşa	31.680.000,00	31.680.000,00	
OPERASIONAL LPM	2.404.000,00	2.404.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	2.404.000,00	2.404.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	2.404.000,00	2.404.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	490.000,00	490.000,00	
Belanja Barang Cctak Dan Peggandaan	114.000,00	114.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	
Operasional PKK	3.665.000,00	3.665.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	3.665.000,00	3.665.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	3.665.000,00	3.665.000,00	

URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	1.100.000,00	1.100.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.365.000,00	2.365.000,00	
Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	905.000,00	905.000,00	
Operasional Linmas	350.000,00	350.000,00	ADD
Belanja Barang Dan Jasa	350.000,00	350.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	350.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos	80.000,00	80.000,00	
Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	240.000,00	240.000,00	
Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintah	27.500.000,00	27.500.000,00	SWD
Belanja Modal	27.500.000,00	27.500.000,00	
Belanja Modal Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	
Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	27.500.000,00	27.500.000,00	
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	
Lain-Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	DDS
Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>856.921.225,00</b>	<b>856.921.225,00</b>	
Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah No	15.000.000,00	15.000.000,00	DDS
Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	
Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	
Belanja Khusus Pendidikan Dan Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Bidang Kesehatan	27.200.000,00	27.200.000,00	
Pembangunan/Rchabiiitasi/Peningkatan/Pengadaan Sa	20.000.000,00	20.000.000,00	DDS
Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	20.000.000,00	20.000.000,00	
Operasional Mobil Sehat	7.200.000,00	7.200.000,00	DDS

URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Barang Dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	
Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.600.000,00	
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum Daan Penataan Ruang	814.721.225,00	814.721.225,00	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/	200.000.000,00	200.000.000,00	PBK
Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman	200.000.000,00	200.000.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman-Honor	9.000.000,00	9.000.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman-Upah	39.053.784,17	39.053.784,17	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman-Bahan Baku	148.446.215,83	148.446.215,83	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman-Sewa	500.000,00	500.000,00	
Belanja Modal Gedung, Bangunan Dan Taman-Administrasi	3.000.000,00	3.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja	385.657.450,00	385.657.450,00	DDS,PBK, SWD
Belanja Barang Dan Jasa	126.421.263,00	126.421.263,00	
Belanja Barang Perlengkapan	126.421.263,00	126.421.263,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	
Belanja Bahan Material	125.371.263,00	125.371.263,00	
Belanja Modal	259.236.187,00	259.236.187,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	259.236.187,00	259.236.187,00	
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.805.000,00	3.805.000,00	
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.903.780,00	35.903.780,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	194.233.503,00	194.233.503,00	
Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	10.083.985,00	10.083.985,00	
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	15.209.919,00	15.209.919,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jak	53.588.000,00	53.588.000,00	DDS
Belanja Barang Dan Jasa	399.000,00	399.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	399.000,00	399.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	399.000,00	399.000,00	
Belanja Modal	53.189.000,00	53.189.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air	53.189.000,00	53.189.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Dil - Honor Tim	1.145.000,00	1.145.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Dil - Upah Tena	22.420.000,00	22.420.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Dil - Bahan Bak	28.518.000,00	28.518.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Dil - Sewa Pera	507.000,00	507.000,00	

URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/Dll-Administrasi	599.000,00	599.000,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	0,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Honor Tim Pelaksana	0	0,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Upah Tenaga Kerja	0	0,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Bahan Baku/Material	0	0,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Sewa Peralatan	0	0,00	
Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Administrasi Kegiatan	0	0,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penal	175.475.775,00	175.475.775,00	DDS
Belanja Barang Dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	1.050.000,00	1.050.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	
Belanja Modal	174.425.775,00	174.425.775,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/Air Limbah	174.425.775,00	174.425.775,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/-Honor Tim	2.982.000,00	2.982.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/-Upah Tenaga	71.420.000,00	71.420.000,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/-Bahan Baku	94.976.400,00	94.976.400,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/-Sewa Perlengkapan	2.174.300,00	2.174.300,00	
Belanja Modal Irigasi/Embun/Drainase/-Administrasi	2.873.075,00	2.873.075,00	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	11.400.000,00	11.400.000,00	
Pemantauan Pertumbuhan Dan Penyediaan Makanan	11.400.000,00	11.400.000,00	DDS
Belanja Barang Dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	
Belanja Barang Dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	9.600.000,00	9.600.000,00	
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Luas	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	0,00	0,00	
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	DDS
Belanja Modal	0,00	0,00	
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	414.362.775,00	414.362.775,00	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	90.362.775,00	90.362.775,00	
Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	90.362.775,00	90.362.775,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	90.362.775,00	90.362.775,00	
Belanja Tidak Terduga	90.362.775,00	90.362.775,00	

URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Tidak Terduga	90.362.775,00	90362775	
Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	324000000	
Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	324000000	DDS
Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324000000	
Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324000000	
Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324000000	
JUMLAH BELANJA	1.803.742.710,00	1803742710	
SURPLUS (DEFISIT)	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN			
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	

Melihat informasi dan fakta yang terungkap, maka berikut ini akan diuraikan pembahasan Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan perincian masalah sebagai berikut:

Dari hasil pengujian, desa Pataan untuk pengelolaan dana desanya dapat diterima karena sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 yaitu :

a. Transparan

Dalam hal ini pada desa Pataan setiap adanya dana desa dan penggunaannya akan dibuatkan papan pengumuman APBDes yang diletakkan depan balai desa yang mempunyai tujuan supaya warga dan setiap orang mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tadi dan setiap perencanaan penggunaan dana desa akan melakukan musyawarah yang melibatkan warga desa yang bertujuan supaya

penggunaan dana desa tadi sinkron menggunakan kebutuhan warga .

b. Akuntabel

Di desa Pataan sendiri setiap adanya proses penerimaan ataupun pengeluaran dana desa pada hal ini bendahara desa akan mencatat pada kitab kas desa dan memakai cek buat menjadi bukti transaksi.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban pada desa Pataan terhadap ADD melibatkan eksklusif warga melalui musyawarah bersama. Laporan pertanggungjawaban tadi dibentuk dan dipertanggungjawabkan sang ketua desa pada warga melalui kedap BPD pada jangka saat sekali pada setahun dalam akhir tahun anggaran. Partisipatif. Pemerintah desa Pataan harus partisipatif pada perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan melibatkan aparat desa dan masyarakat yang ada.

d. Tertib dan disiplin

Tertib dan disiplin Anggaran Di desa Pataan sendiri pada pelaporan dana desa telah membuatnya pada pencatatan yg sinkron menggunakan prinsip akuntansi pada hal ini telah memakai Sistem Informasi Akuntansi.

Oleh karena itu, dari laporan keuangan di atas, saya berpendapat bahwa hal itu telah berjalan dengan baik mengingat dalam pembuatan laporan keuangan dana desa sesuai dengan visi dan misi desa dan dalam laporan gaji, konsumsi, dan pembiayaan. memanfaatkan dana desa telah dicatat dan menjelang akhir setiap semester atau akhir tahun, laporan keuangan akan dipusatkan oleh pemerintah desa untuk direnungkan di masa depan termasuk wilayah desa setempat. Dalam pembuatan laporan keuangan desa, kepala desa memilih satu orang untuk menjadi keuangan desa yang membuat laporan keuangan desa menggunakan komputer yang sesuai dengan administrasi keuangan desa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 secara khusus jelas, bertanggung jawab, partisipatif dan disiplin anggaran. Selain sudah menggunakan SIA karena sudah memiliki kriteria peraturan yang ada dan sudah menggunakan basis kas yaitu adanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Laporan keuangan desa sudah tepat dan berjalan dengan efektif karena dalam penatausahaan keuangan telah menggunakan SIA yang menggunakan buku kas umum sebagai bukti transaksi, serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan sudah membuatnya sesuai dengan siklus penatausahaan keuangan desa yang terdapat bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa, yang dapat kita lihat dari data diatas, serta disetiap bulannya melakukan penutupan atas buku kas desa yang berguna untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Laporan keuangan desa sudah tepat dan berjalan dengan efektif karena dalam penatausahaan keuangan telah menggunakan SIA dan semua penerimaan dana desa menjadi tolak ukur di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa di desa Pataan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada dan pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa bisa mengelola keuangan tersebut dengan baik sesuai dengan fungsi dana desa tersebut. serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah membuatnya sesuai dengan siklus penatausahaan keuangan desa yang terdapat bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa, serta disetiap bulannya melakukan penutupan atas buku kas desa yang berguna untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran. Pergerakan ini tergantung pada kewajiban dan tugas petugas keuangan. Di desa Pataan, sekretaris desa berkewajiban untuk mengarahkan semua penerimaan dan distribusi kas desa. Kewajiban tugas

tanggungjawab dan prosedur penatausahaan bendahara di desa Pataan :

- a. Bertanggung jawab atas penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bertanggung jawab atas pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku catatan kas.

Di desa Pataan sendiri, dalam penatausahaan keuangan yang ada di desa dilakukan oleh sekretaris desa yang telah ditunjuk oleh kepala desa yaitu Zarotul Mujahidah A Dalam penatausahaan keuangan desa sekretaris desa selaku pelaksana penatausahaan keuangan desa sudah dapat membuat laporan anggaran desa pertahunnya, dapat dilihat dari adanya laporan keuangan desa disetiap akhir tahun atau sering disebut APBDES seperti dapat kita lihat di tabel bawah ini :

## **KESIMPULAN**

1. Dalam merencanakan laporan keuangan desa, kepala desa memilih salah satu orang daerahnya untuk membuat laporan keuangan desa dengan menggunakan komputerisasi yang sesuai dengan peraturan keuangan desa yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 secara langsung, bertanggung jawab, partisipatif dan disiplin anggaran. Terlebih lagi, serta menggunakan SIA sampai sekarang memiliki kriteria peraturan yang berlaku dan telah menggunakan basis kas, khususnya adanya pembayaran,

penggunaan, dan pembiayaan dalam rencana pengeluaran.

2. Dalam merencanakan laporan keuangan desa kepala desa memilih satu orang daerahnya untuk membuat laporan keuangan desa sudah tepat dan berjalan dengan efektif karena dalam penatausahaan keuangan telah menggunakan SIA yang menggunakan buku kas umum sebagai bukti transaksi, serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah membuatnya sesuai dengan siklus penatausahaan keuangan desa yang terdapat bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa, yang dapat kita lihat dari tabel diatas, serta disetiap bulannya melakukan penutupan atas buku kas desa yang berguna untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

## **REKOMENDASI**

1. Pemerintah desa Pataan harus bekerja pada kantor yang mendukung contohnya didalamnya terdapat jaringan internet agar proses yang berhubungan dengan keuangan berjalan dengan sangat baik..
2. Dalam menangani desa pemerintah desa harus memiliki pilihan untuk memanfaatkan lebih banyak aset desa sehingga desa menjadi maju dan keuntungan bisa dirasakan oleh masyarakat desa.
3. Seharusnya dalam pengelolaan informasi dan perencanaan desa pemerintah desa harus banyak.

4. Masyarakat yang terlibat dari desa jangan hanya perangkat desa saja yang terlibat agar dalam pengelolaannya semua masyarakat mengetahuinya.
5. Mengadakan sosialisasi tentang aplikasi yang berhubungan dengan keuangan desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kaharuddin. Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Paladang Kabupaten Enr E kang. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Munthe, Nur Alilah. Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Tangkaroro, Kenny Larony dkk. Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal : Universitas Sam Ratulangi.
- Rezeki, Shelvia. Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa.